



Ketidakpatuhan Australia Terhadap *Antarctic Treaty* dengan Penempatan Militer di Antartika

Fakhriza Naufal Rakin, Satwika Paramasatya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explain Australia's non-compliance with the Antarctic Treaty regime that they had previously ratified by placing military technology on the "peaceful" continent of Antarctica, which is the choice made by the Australian government at this time. Australia is one of the important figures in the Antarctic Treaty regime where Australia is a country that has the largest claim area in Antarctica and is a country that strongly promotes the Antarctic Treaty with the desire that Antarctica can become a continent that will only be used for peaceful purposes and research to advance science. But recently Australia took the decision to violate the rules of the regime that they had agreed to and ratified by disobeying the regime where Australia carried out military deployments and military technology in Antarctica which Australia did openly and knowingly that its actions had breaking the rules of the regime. The data collected in this study used the documentation method. This research will use the method of Compliance Theory and Rational Choice Theory. This research will try to explain Australia's non-compliance with the international regime it has ratified and promoted and the factors that drive its non-compliance.

Keywords: *Non-compliance, Antarctica, Antarctic Treaty, Rational Choice Theory, Compliance Theory*

PENDAHULUAN

Antartika merupakan benua terbesar kelima di dunia dan merupakan benua yang paling kurang dieksplorasi oleh manusia yang ada saat ini dan juga merupakan benua yang paling tidak ramah di dunia. Hal tersebut dikarenakan Antartika merupakan sebuah gurun beku, dengan es setebal lebih dari 1 mil (1,6 km). Antartika juga merupakan benua terkering di dunia dengan kurang dari 4 inci curah hujan dalam setahun yang turun di Kutub Selatan. Selain itu Antartika memiliki bulan kegelapan total di musim dingin dimana pada saat tersebut tidak ada sinar matahari yang menyinari Antartika pada waktu tersebut (Quora, 2018). Antartika juga merupakan benua terdingin yang ada di dunia dan benua yang memiliki cuaca paling ekstrim di dunia, bahkan pada musim panas saja Antartika memiliki suhu antara -5°C sampai -20°C yang dimana pada musim tersebut merupakan waktu yang cocok untuk manusia dapat mendatangi Antartika (Weather Online, 2019). Ekstrimnya cuaca Antartika juga dapat diketahui dari curah hujan salju yang terjadi, yang apabila hujan salju tersebut

terkonsentrasi di sekitar pantai, salju-salju tersebut dapat menumpuk hingga mencapai ketebalan 48 inci (121,92 cm) hanya dalam waktu beberapa jam saja (Quora, 2018). Sebagai benua terdingin dan benua yang paling kurang tereksplorasi di dunia dimana tidak ada populasi manusia yang menetap di benua tersebut, kedatangan manusia di benua tersebut dibatasi hanya untuk kelompok *environmental*, penjelajah dan juga ilmuwan. Selain cuacanya yang ekstrim di Antartika juga terdapat hewan-hewan yang hanya dapat ditemukan Antartika, dan oleh karena itu para ilmuwan yang datang ke Antartika untuk tujuan penelitian pasti juga akan memiliki program untuk perlindungan akan satwa-satwa tersebut.

Di Antartika negara-negara tidak bisa seenaknya melakukan hal-hal yang mereka mau. Terdapat aturan-aturan yang membatasi dan mencegah negara-negara yang memiliki kepentingan di Antartika bertindak semena-mena. Tindakan yang boleh dilakukan oleh negara di wilayah Antartika tersebut diatur di dalam sebuah perjanjian, yaitu *Antarctic Treaty* yang dibuat dan ditandatangani oleh 12 negara pada 1 Desember 1959 yang dimana 12 negara tersebut adalah Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris yang merupakan negara yang aktif di dalam *Geophysical Years* (1957-1958) dan memiliki kepentingan di Antartika pada masa tersebut, *Antarctic Treaty* itu sendiri mulai berlaku pada 1961 (Secretariat of the Antarctic Treaty, 2019). Sejak mulai berlakunya *Antarctic Treaty* negara-negara selain 12 negara tersebut mulai melakukan penandatanganan dan meratifikasi isi dari *Antarctic Treaty* tersebut. Hal tersebut menunjukkan kalau negara-negara saat ini mulai sadar akan pentingnya keberadaan dari Antartika dan perlunya aturan di Antartika untuk mengurangi kemungkinan rusaknya Antartika dengan adanya berbagai kepentingan negara untuk melakukan penelitian di Antartika. Kepentingan dan juga penelitian yang dilakukan oleh negara-negara diharapkan dilakukan bukan hanya untuk keuntungan bagi masing-masing negara namun juga kepentingan umat manusia.

Australia sendiri memiliki peran yang cukup penting pada penelitian yang dilakukan di Antartika, dimana Australia merupakan salah satu dari 12 negara yang melakukan ratifikasi pertama pada *Antarctic Treaty* dan memiliki klaim wilayah hampir 42% dari wilayah di Antartika (Esri Content, 2019). Australia merupakan salah satu aktor penting yang memiliki pengaruh cukup besar di wilayah Laut Selatan dan Antartika. Hal tersebut dikarenakan sejak 1961 Australia sudah banyak melakukan penelitian yang banyak berkontribusi untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Beberapa kontribusi Australia tersebut itu adalah dengan membuat sebuah divisi penelitian yaitu *Australian Antarctic Division* yang terpecah menjadi beberapa divisi lagi yang salah satunya adalah *Australian Marine Mammal Centre* yang berfokus dalam penelitian untuk memahami, menjaga dan mengkonservasi mamalia-mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, anjing laut dan dugong.

Pada 2015, Australia mengambil keputusan untuk melaksanakan salah satu politik luar negerinya di Antartika dengan menempatkan teknologi militernya di wilayah Antartika. Tercatat kalau Australia hingga saat ini menggunakan pesawat transportasi kelas militer yaitu C17-A *Globemaster* sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi militer di wilayah Antartika yang dilakukan oleh Australia (Gothe-Snape, Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity, 2019). Selain penggunaan pesawat militer *Operation Southern Discovery* yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara ADF juga dilakukan oleh Angkatan Laut ADF yang dimana dalam hal ini Angkatan Laut ADF melakukan peningkatan kemampuan dari kapal milik Angkatan Laut agar mampu digunakan sebagai pemecah es pembantu (The Cove, 2022). Dalam operasi ini Australia juga melakukan

pembangunan sebuah Stasiun penerima sinyal satelit Antartika yang digunakan untuk melakukan penerimaan sinyal C4ISR (*command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance*) (Lockheed Martin, 2022) yang merupakan sebuah sistem militer yang dapat sangat meningkatkan kemampuan pertahanan dalam pertempuran udara-laut dari negara yang menggunakannya dan juga dapat pula digunakan sebagai sebagai sitem pengaturan waktu rudal, dan penentuan posisi rudal, dan dalam penerapannya Australia menggunakan bantuan dari sistem GPS milik Amerika yang sudah sudah dipasangkan sejak tahun 1995 (The Cove, 2022). Secara sadar Australia mengetahui kalau politik luar negeri yang dilaksanakan ini melanggar *Antarctic Treaty* yang sudah dibuatnya bersama 11 negara pencetus perjanjian tersebut. Namun Australia secara terbuka tetap melaksanakan politik luar negerinya tersebut walau melanggar perjanjian tersebut. Pasal yang dialanggar oleh Australia dalam *Antarctic Treaty* adalah pasal I ayat I yang berbunyi:

“Antartika hanya akan digunakan untuk tujuan damai. Akan dilarang, antara lain, segala tindakan yang bersifat militer, seperti pendirian pangkalan dan pangkalan militer, pelaksanaan manuver militer, serta pengujian segala jenis senjata.” (The Antarctic Treaty, 1961)

Lalu bagaimanakah cara kita mengetahui maksud dan tujuan yang dimiliki oleh Australia dngan tindakannya ini? Dalam essay ini penulis menggunakan pendekatan teori kepatuhan milik Ronald B. Mitchell yang secara garis besar merupakan sebuah teori yang didefinisikan sebagai tindakan dari aktor internasional terhadap suatu rezim, aturan-aturan, maupun perjanjian internasional (Mitchell, 1996). Dalam konsep tersebut terdapat tiga sikap aktor internasional dalam memandang atau menyikapi sebuah rezim internasional dan sikap-sikap tersebut adalah *“non-compliance as preference, non-compliance due to incapacity, dan non-compliance due to inadvertence”*.

Selain itu penulis juga menggunakan teori Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dimana dalam hubungan internasional *rational choice* dapat dijelaskan sebagai sebuah teori yang menjelaskan suatu fenomena sosial yang merupakan hasil dari tindakan negara/individu sebagai aktor yang dapat dijelaskan sebagai sebuah hal yang rasional (Wittek, 2013). Menurut Rafael Wittek inti dari teori *rational choice* memiliki dua buah dimensi berdasarkan dengan tingkatan yaitu pertama, hadir dengan penjelasan yang “tipis (*thin*)” yang terpaku pada neoklasik dan “tebal (*thick*)” yang merupakan versi sosiologisnya (Wittek, 2013). Kedua penjelasan ini masing-masing terbagi dalam tiga dimensi yang berbeda: (1) tipe dari rasionalitasnya, (2) preferensi, dan (3) asumsi individual. Kemudian Stephen M. Walt dalam jurnalnya menjelaskan teori pilihan rasional dalam lingkungan internasional khususnya dalam studi keamanan diartikan sebagai penggunaan seperangkat teknik untuk menganalisa keputusan-keputusan sebuah negara, dalam situasi dimana setiap negara sebagai aktor akan bertindak bergantung pada apa yang diekspektasikan dilakukan oleh negara lain. Di setiap negara, kebijakan luar negeri selalu digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Negara dalam sebagai aktor rasional berusaha memilih setiap alternatif pilihan demi memaksimalkan *benefit* yang didapatkan dan meminimalisir *cost* yang dibayar untuk mencapai tujuannya (Walt, 1999).

PEMBAHASAN

Pada masa perang dingin telah terjadi rivalitas antar negara dalam perebutan atau klaim terhadap Semenanjung Antartika. Dalam perebutan wilayah tersebut pada tahun 1940-an mulailah muncul tanda-tanda berupa percikan-percikan yang dapat berkembang menjadi sebuah konflik antar negara-negara yang terlibat dalam perebutan klaim Semenanjung Antartika tersebut (Australian Government Departement of Agriculture, Water and Environment, 2016). Untuk melakukan antisipasi agar tidak terjadinya konflik karena perebutan klaim tersebut maka diplomat dari negara-negara yang terlibat perebutan ini mulai membicarakan mengenai perjanjian yang dapat mengatur urusan dalam permasalahan Antartika ini.

Konferensi untuk melakukan negosiasi dalam pembuatan *Antarctic Treaty* ini dimulai pada awal bulan Juni 1958 bertempat di Washington D.C. Negara-negara yang ikut dalam negosiasi ini berjumlah dua belas negara yang terdiri dari Argentina, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Rusia (Uni Soviet), Inggris, Amerika Serikat dan tentu saja Australia (Watt, 2019). Selain menjadi negara yang bernegosiasi langsung dalam membahas *Antarctic Treaty*, kedua belas negara tersebut juga menjadi negara-negara pertama yang melakukan penandatanganan terhadap *Antarctic Treaty* setelah mencapai kesepakatan yang dilaksanakan pada 1 Desember 1959 di lokasi yang sama dengan konferensi negosiasi terakhir dalam pembahasan isi dari *Antarctic Treaty* (Secretariat of the Antarctic Treaty, n.d.) dan mulai diberlakukan aturannya pada 23 Juni 1961 (Encyclopedia Britannica, n.d.).

Pada tahun 1989 Australia memutuskan untuk tidak melakukan ratifikasi terhadap perjanjian untuk mengendalikan aktivitas pengeksploitasian mineral yang ada di Antartika, tetapi memilih untuk mencari dukungan dari negara-negara yang sudah menjadi anggota *Antarctic Treaty* untuk membuat Antartika menjadi sebuah benua yang dilindungi secara penuh baik pada wilayah darat maupun wilayah laut sekitarnya. Dalam hal ini Protokol Madrid, yang ditandatangani oleh negara anggota *Antarctic Treaty* yang hadir di pada pertemuan yang dilaksanakan di kota tersebut dimana hal ini merupakan hasil langsung dari inisiatif yang dilakukan oleh Australia, Perancis, Italia dan Belgia, dan kesepakatan ini menjadi sebuah titik penting dari sejarah *Antarctic Treaty* (Australia's Department of Agriculture, Water and the Environment, 2020). *Antarctic Treaty* sendiri pada awalnya bertujuan membuat Antartika agar terbebas dari konflik yang terjadi di dunia pada masa tersebut, membuat Antartika menjadi wilayah yang boleh didatangi oleh negara demi tujuan damai dan untuk penelitian demi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi umat manusia. Dengan berakhirnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet ini menjadikan *Antarctic Treaty* berubah dari sebuah perjanjian untuk membebaskan Antartika dari sampah dan persenjataan yang mengandung unsur-unsur radioaktif menjadi sebuah perjanjian untuk menjadikan Antartika sebuah cagar alam untuk tujuan damai yang hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk umat manusia.

Dalam rezim *Antarctic Treaty* terdapat sebuah pembagian kelompok negara dimana pembagian ini membagi dan mengidentifikasi empat kelompok kepentingan negara yang memiliki perspektif hukum berbeda pada masalah kedaulatan di Antartika (Trolle-Andersen, 1987), keempat kelompok tersebut adalah:

- a. *Antarctic Treaty* menyatakan negara mana saja yang mengklaim kedaulatan wilayah di Antartika;
- b. Anggota *Antarctic Treaty* yang menyangkal atau tidak mengakui klaim kedaulatan teritorial dan tidak membuat klaim mereka sendiri;
- c. Anggota *Antarctic Treaty* yang tidak mengakui klaim kedaulatan Antartika tetapi yang menyimpan “hak” mereka untuk mengajukan klaim di masa depan;
- d. Negara-negara yang bukan bagian dari rezim *Antarctic Treaty* tetapi menolak klaim kedaulatan dengan alasan bahwa Antartika adalah, atau harus menjadi, bagian dari warisan bersama umat manusia.

Setiap negara dalam empat grup ini memiliki kekuatan politik dan hukum untuk melindungi kepentingannya masing-masing yang pada akhirnya diberi sebutan *The four-way veto* oleh duta besar Australia, Keith Gabriel Brennan (Triggs, 1987).

Sebagai sebuah benua yang masih asing bagi manusia dan masih memiliki banyak misteri dan juga sumber daya alam mentah yang melimpah tentu saja setiap negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi ke Antartika menginginkan bagian dan kesempatan untuk menginjakkan kakinya di benua tersebut. Tiongkok yang saat ini berada dibawah kepemimpinan Xi Jinping dimana Tiongkok mengalami peningkatan dalam berbagai aspek dimana Tiongkok mulai menjadi sebuah negara adidaya baru yang berada di Asia yang dapat menyaingi Amerika dalam berbagai macam aspek yang ada (Swain, 2021), salah satu aspek yang dilirik oleh Tiongkok di sini adalah pada hal eksplorasi di Antartika.

Awal kepemimpinan Xi Jinping pada awal tahun 2013 lalu menjadi sebuah babak baru ambisi dari Tiongkok dimana Tiongkok mengajukan proposal permohonan izin kepada Australia sebagai salah satu pemilik kuasa tertinggi di rezim *Antarctic Treaty* dan pemilik wilayah klaim terbesar untuk melakukan pendirian sebuah stasiun penelitian baru di Antartika pada saat pertemuan konsultatif dari *Antarctic Treaty* (Brady, China’s expanding Antarctic interests | Implications for Australia, 2017). Namun, Tiongkok mendapatkan penolakan atas proposal yang diberikannya kepada Australia (Brady, China’s expanding Antarctic interests | Implications for Australia, 2017). Walaupun mendapat penolakan secara tegas, ambisi Tiongkok yang besar untuk melakukan eksplorasi di Antartika ini mengalahkan penolakan yang diberikan oleh Australia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Tiongkok yang kembali mengajukan proposal pada tahun 2014 yang bersamaan dengan selesainya pembangunan stasiun penelitian Antartika kedua yang diberi nama ‘Taishan’ (Gothe-Snape, China unchecked in Antarctica, 2019), namun proposal kedua tersebut juga mengalami penolakan dari Australia (Swain, 2021). Masih belum menyerah atas penolakan kedua yang dialaminya, Tiongkok kembali lagi mengajukan proposal ASMA (*Antarctic Specially Managed Area*) yang berisikan permohonan izin yang ditambahi juga permintaan akan hak untuk melakukan pengelolaan terhadap “Dome Argus (Dome A)” yang terletak di tengah-tengah dari wilayah klaim milik Australia beruntuntun pada tahun 2015, 2016 dan 2017 (Brady, China’s expanding Antarctic interests | Implications for Australia, 2017).

Ambisi Tiongkok untuk mengeksplorasi Antartika tentu saja memiliki sebuah tujuan dan bukan hanya berkeinginan untuk menginjakkan kakinya di Antartika namun juga memiliki sebuah tujuan dan juga sebuah kepentingan dari negara mereka. Melihat dengan kebangkitan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping, kedatangan Tiongkok di

Antartika tentu bukan hanya semata-mata tidak ingin tertinggal dengan Amerika dan Rusia dalam pengeksplorasian Antartika.

Dalam hal ini Tiongkok menyatakan tujuan-tujuannya. **Pertama**, Tiongkok melakukan proyek pengeboran inti es dalam pertamanya yang dilakukan di Stasiun Penelitian Kunlun yang dimana pengeboran ini bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap debu dan partikel-partikel berada di atmosfer bumi selama beratus bahkan beribu tahun yang lalu yang pada akhirnya mengendap di lapisan es di antartika. **Kedua**, keinginan tinggi Tiongkok untuk menjadi negara puncak dalam penyedia hasil tangkapan krill yang menguasai pasar penyuplaian krill. Keinginan ini sendiri juga didorong oleh kebutuhan akan udang krill dengan kualitas tinggi yang diinginkan oleh masyarakat menengah keatas di Tiongkok meningkat yang membuat kebutuhan akan eksploitasi udang krill juga ikut meningkat, selain ingin memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya Tiongkok juga menginginkan pemancingan krill yang mereka lakukan juga dapat berkembang hingga mencapai pasar di Eropa (Martin, 2015). **Ketiga**, keinginan Tiongkok untuk pembukaan jalur sutra baru dimana dalam inisiatif pembuatan *Polar Silk Road* ini Tiongkok merencanakan untuk pengerjaan jalur sutera ini dalam jangka waktu 5 tahun yang dimulai pada 2021 yang diprediksi akan selesai pada 2025 yang dimana pengerjaan ini masuk di dalam program pemerintahan Tiongkok yaitu “*five-year plan*” (WION, 2021). **Keempat**, Tiongkok menempatkan personel dan teknologi militernya di Antartika yang dalam penempatan militernya Tiongkok memiliki beberapa faktor pendorong lain selain mengamankan kepentingannya yang sudah ada di Antartika yaitu:

1. Menganggap kalau wilayah Antartika sebagai sebuah rute strategis bagi negaranya,
2. Antartika merupakan sebuah wilayah vital yang strategis dengan kedaulatan yang masih belum menentu yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang masih belum terjamah oleh tangan manusia, dan
3. Antartika juga dianggap sebagai sebuah lokasi startegis dan ideal untuk melakukan penelitian terkait dengan bidang militer dan juga untuk instalasi satelit strategis

Dalam penempatan teknologi militer ini Tiongkok sebuah peralatan navigasi kelas militer BeiDou yang dimana peralatan navigasi ini merupakan rival dari peralatan navigasi kelas militer milik Amerika Serikat. Selain faktor yang sudah disebutkan sebelumnya keinginan Tiongkok untuk menempatkan teknologi militernya di Antartika, ada juga keinginan Tiongkok untuk memperluas penempatan kapal selam rudal balistik tenaga nuklir miliknya pada laut lingkaran Arktik dan lingkaran Antartika. Hal ini juga dilaksanakan guna memulihkan kemampuan pencegahan nuklir milik Tiongkok terutama pada Amerika Serikat (Ribao, 2017).

Tiongkok melakukan instalasi militer ini juga didasari pemikirannya yang dimana Tiongkok berpikir jauh kedepan hingga tahun 2048, pada tahun tersebut *Antarctic Treaty* masuk pada masa dimana aspek utama dari *Antarctic Treaty* akan terbuka untuk dinegosiasikan ulang yang dapat berpotensi menimbulkan bencana bagi kepentingan negara anggota dari *Antarctic Treaty* terutama Australia yang saat ini kepentingannya terganggu dikarenakan tindakan penempatan militer dan teknologi militer Tiongkok pada wilayah klaim yang dimiliki Australia apalagi pada wilayah DOME A yang strategis secara sains

maupun militer (Press, 2019) (Gothe-Snape, China unchecked in Antarctica, 2019) (Hooper, 2021).

Keberadaan Tiongkok di Antartika serta keinginan Tiongkok untuk menjadi kekuatan besar di kedua wilayah Kutub menjadi salah satu sebuah peristiwa politik yang menjadi kekhawatiran Australia kepada keadaan dari wilayah kedaulatannya atau wilayah klaimnya di Antartika. Selain itu Australia disini sebagai salah satu negara pemilik wilayah klaim menggunakan haknya untuk menjadikan tindakan instalasi perangkat militer oleh Tiongkok ini sebagai salah satu perhatiannya yang penting di Antartika (Australian Government - Departement of Defence, 2016). Juru bicara dari Departemen Pertahanan Australia juga mengatakan “Setiap pelanggaran *Antarctic Treaty*, termasuk kegiatan militer oleh negara pihak manapun, akan menjadi perhatian Australia”.

Departemen Pertahanan Australia juga meyakini kalau Tiongkok pada dasarnya sudah melakukan berbagai macam aktivitas yang sebenarnya dilarang oleh *Antarctic Treaty*, keyakinan ini juga diperkuat dari pernyataan yang disampaikan para pengamat politik Australia yang secara terbuka menyatakan “Tiongkok telah melakukan kegiatan militer yang tidak diumumkan di Antartika, dimana sedang membangun kasus untuk klaim teritorial dan terlibat dalam eksplorasi mineral” (Hooper, 2021). Mengetahui hal ini pemerintah Australia terutama Departemen Pertahanan Australia mulai mengambil tindakan tegas yang nyata dengan menghabiskan \$2,2 miliar dolar dana tambahan untuk mengamankan kepentingan Australia di Antartika dengan melibatkan ADF dalam (Australian Government, 2017). Selain itu Departemen Pertahanan juga memberikan anjuran kepada pemerintah Australia untuk melakukan hal yang sama seperti Tiongkok dengan menggunakan sebuah teknologi militer yang memiliki fungsi “*dual-use*” dalam memberikan respon dari tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok dengan menerjunkan militernya dan teknologi militernya di Antartika (Press, 2019). Hal-hal inilah yang menunjukkan kalau pemerintah Australia mendapatkan dorongan dari Departemen Pertahanan Australia untuk menggunakan cara “keras” dalam menindak Tiongkok yang mengganggu jalannya kepentingan Australia di Antartika.

Tindakan Australia ini merupakan *non-compliance as preference*, yaitu Australia memilih untuk tidak patuh karena dilatarbelakangi oleh pertimbangan atau kalkulasi antara manfaat dan pengorbanan (*benefit and cost*) yang didapat apabila mematuhi perjanjian tersebut dan apabila tidak mematuhinya. Australia menganggap *benefit* atau keuntungan yang akan didapat dari kepatuhannya terhadap *Antarctic Treaty* akan tidak menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya di masa sekarang dan selanjutnya daripada mematuhi *treaty* tersebut dengan mempertimbangkan dinamika situasi geopolitik dunia saat ini.

Perdana menteri Australia Scott Morrison menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki tujuan yang sama dengan Australia di Antartika yang dimana Australia melakukan berbagai macam aktivitas di Antartika dan memberikan akuntabilitas dan transparansi informasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan tidak menutupi, sedangkan Tiongkok disini hanya memberikan transparansi informasi pada aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak mengotori nama baiknya di muka dunia dan anggota lain dari *Antarctic Treaty* dan tetap berada di area “abu-abu” yang sering menimbulkan kecurigaan (Gould, 2022). Perdana Menteri Morrison juga menyampaikan pada Februari lalu kalau Australia meluncurkan paket tambahan senilai \$575 juta dollar yang di desain untuk menyamai kepentingan Tiongkok di Antartika. Paket pendanaan tersebut digunakan untuk sepuluh tahun kedepan dalam

pelaksanaan operasi “*Eyes on Antarctica*” dengan meningkatkan kemampuan negara untuk mensurvei dan memantau tundra beku dan perairan sekitarnya menggunakan drone, helikopter, dan kendaraan otonom. Perdana Menteri Morrison juga menekankan kalau tindakan yang dilakukannya juga berdasarkan kekhawatiran dengan semakin meningkatnya aktivitas Tiongkok di Antartika (Agence France Presse, 2022).

Dengan adanya perbedaan tujuan di Antartika yang dilakukan Tiongkok hal ini akan dilihat sebagai sebuah *cost* atau pengorbanan yang cukup besar apabila dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan *Antarctic Treaty* akan mengalami masa “kadaluarsa” bersamaan dengan adanya penunjang kembali secara ilmiah akan Protokol Madrid pada 2048 menjadi pendorong semakin rentannya wilayah klaim milik Australia yang sudah disusupi Tiongkok apabila Australia tidak segera melakukan tindakan terlebih dahulu untuk mengendalikan aktivitas Tiongkok di Antartika.

Dalam konteks kepentingan nasionalnya, setiap negara akan menggunakan kebijakan luar negerinya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan tidak mematuhi ketentuan *Antarctic Treaty* dilihat dari teori pilihan rasional (*rational choice theory*) merupakan keputusan yang telah dibuat berdasarkan rasionalitas negara tersebut sebagai aktor yang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus diambil sebagai respon atas meningkatnya aktivitas Tiongkok di Antartika. Proses pembuatan keputusan pemerintah Australia dalam menentukan pilihan untuk kepentingan nasionalnya itu dapat dilihat sebagai rasional. Karena rasionalitas atau rasional didefinisikan sebagai prosedur pembuatan keputusan yang dipandu dengan mendefinisikan situasi dengan hati-hati, menimbang tujuan, mempertimbangan seluruh alternatif, dan memilih opsi yang paling mungkin untuk mencapai tujuan yang paling tertinggi (Walt, 1999).

Proses pembuatan keputusan untuk tidak mematuhi *treaty* ini dapat dipandang sebagai pilihan rasional dari kesatuan individu rakyat Australia berdasarkan atas hasil aspirasi sosial politiknya. Hal ini dilihat dari adanya pendapat yang dikemukakan oleh oposisi Australia bahwa eksplorasi yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah DOME A tidak memiliki pijakan formal mengingat wilayah tersebut adalah wilayah klaim Australia (ABCNews, 2020). Desakan oposisi dalam negeri Australia ini dapat dilihat sebagai sikap politik sebagian rakyat Australia yang mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap kepada Tiongkok yang telah melakukan eksplorasi di wilayah klaim Australia di Antartika tanpa seijin Australia. Pilihan rasional ini merupakan produk kolektif yang dibuat oleh kesatuan aktornya yaitu masyarakat Australia. Pilihan tersebut diambil sebagai upaya untuk memaksimalkan atau melindungi kepentingan nasional Australia di Antartika.

PENUTUP

Tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan Australia terhadap *Antarctic Treaty* dengan menempatkan perangkat militer pendeteksi obyek luar angkasa (*dual use*) dan ini berarti melakukan aktivitas militer di Antartika bukan semata untuk tujuan damai akhir-akhir ini adalah respon atas kebangkitan Tiongkok yang semakin nyata memiliki ambisi akan menggantikan kekuatan adidaya Amerika Serikat di berbagai bidang, baik ekonomi, militer maupun politiknya. Tindakan ketidakpatuhan Australia ini merupakan *non-compliance as preference*, yaitu pilihan yang diambil Australia untuk tidak patuh karena pertimbangan manfaat lebih kecil dibanding potensi kerugian (*benefit and cost*) yang didapat apabila mematuhi perjanjian tersebut. Australia menganggap kepatuhannya terhadap *Antarctic Treaty*

akan tidak menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangan dinamika geopolitik dunia saat ini. Australia melihat adanya potensi gangguan atau ancaman secara langsung yang diperlihatkan oleh meningkatnya aktivitas Tiongkok di wilayah yang diklaim Australia di Antartika.

Keputusan pilihan Australia ini dapat dipandang sebagai pilihan rasional berdasarkan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dari kesatuan individu rakyat Australia berdasarkan atas hasil aspirasi sosial politiknya. Pendapat ini dikemukakan oleh oposisi Australia bahwa eksplorasi yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah DOME A tidak memiliki pijakan formal mengingat wilayah tersebut adalah wilayah klaim Australia dan dikhawatirkan di masa berikutnya akan dijadikan alasan bagi teritorial klaim Tiongkok atas wilayah di Antartika. Desakan oposisi dalam negeri Australia ini dapat dilihat sebagai sikap politik sebagian rakyat Australia yang mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap kepada Tiongkok yang telah melakukan eksplorasi di wilayah klaim Australia di Antartika. Pilihan rasional tersebut diambil sebagai upaya untuk memaksimalkan melindungi kepentingan nasional Australia di Antartika.

REFERENSI

- ABCNews. (2020, September 25). *Defence wants to put military tech in Antarctica despite Treaty ban* | ABC News. Retrieved July 24, 2020, from YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=3KzDQkcg0Ys>
- Agence France Presse. (2022, July 2). *Australia's \$575 Million Plan For Antarctica To Counter China's Interests*. Retrieved from NDTV: <https://www.ndtv.com/world-news/australias-575-million-plan-for-antarctica-to-counter-chinas-interests-2781700>
- Australian Government. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper*. Australian Government.
- Australian Government - Department of Defence. (2016). *2016 Defence White paper*. Australian Government - Department of Defence.
- Australian Government Department of Agriculture, Water and Environment. (2016). *Australian Antarctic Division: Leading Australia's Antarctic Program*. Retrieved July 29, 2020, from <https://www.antarctica.gov.au/law-and-treaty/history/>
- Australia's Department of Agriculture, Water and the Environment. (2020, October 16). *HISTORY OF THE ANTARCTIC TREATY*. Retrieved from Australian Antarctic Division: <https://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/law-and-treaty/history/>
- Brady, A.-M. (2017). China's expanding Antarctic interests | Implications for Australia. *Special Report ASPI, I*, 11.
- Brady, A.-M. (2019). Facing Up to China's Military Interests in the Arctic. *China Brief, 19*(21), 22-27.
- Encyclopedia Britannica. (n.d.). *Antarctica Continent*. Retrieved August 3, 2020, from <https://www.britannica.com/place/Antarctica/The-Antarctic-Treaty>

- Esri Content. (2019). *Territorial Claims of the Antarctic*. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2b1fd17f462047c087e9ce27152b2379>
- Gothe-Snape, J. (2019). *China unchecked in Antarctica*. Retrieved March 5, 2021, from <https://www.abc.net.au/news/2019-03-30/china-in-antarctica-inspection-regime/10858486?nw=0>
- Gothe-Snape, J. (2019). *Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity*. Retrieved July 20, 2019, from <https://www.abc.net.au/news/2019-08-19/australia-antarctica-military-dual-use-technology/11427226>
- Gothe-Snape, J. (2019, 20 August). *Defence wants to roll out military tech in Antarctica despite Treaty ban on military activity*. Retrieved July 20, 2019, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2019-08-19/australia-antarctica-military-dual-use-technology/11427226>
- Gould, C. (2022, June 5). *Scott Morrison puts 'exploitative' China on notice in Antarctica*. Retrieved from News.com.au: <https://www.news.com.au/finance/work/leaders/scott-morrison-puts-exploitative-china-on-notice-in-antarctica/news-story/61a248ce7dbd5fa209234e9a8c69ed5f>
- Hooper, C. (2021). *New Polar Strategy Must Focus On China's Long March To Antarctica*. Retrieved October 24, 2021, from <https://www.forbes.com/sites/craighooper/2021/01/10/new-polar-strategy-must-focus-on-chinas-long-march-to-antarctica/?sh=9bb182d63e35>
- Lockheed Martin. (2022, June 06). *C4ISR is the Foundation of Every Mission*. Retrieved from Lockheed Martin: <https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/c4isr.html>
- Martin, A. (2015). *China Set to Make The Most Krill*. Retrieved April 15, 2021, from <https://www.worldfishing.net/news101/Comment/analysis/china-set-to-make-the-most-of-krill>
- Mitchell, R. B. (1996). Improving Compliance with International Environmental Law. *Compliance Theory: An Overview*, 3-28.
- Press, T. (2019). *Australia wants to install military technology in Antarctica – here's why that's allowed*. Retrieved October 24, 2021, from <https://theconversation.com/australia-wants-to-install-military-technology-in-antarctica-heres-why-thats-allowed-122122>
- Quora. (2018). *Why does Antarctica have no population?* Retrieved July 19, 2020, from <https://www.quora.com/Why-does-Antarctica-have-no-population>
- Ribao, H. (2017). *For the first time, China has an effective underwater strategic nuclear deterrent against the United States*. Retrieved October 22, 2021, from <https://mil.huanqiu.com/gallery/9CaKrnQgYL0>
- Secretariat of the Antarctic Treaty. (2019). *Secretariat of the Antarctic Treaty*. Retrieved July 23, 2020, from https://www.ats.aq/index_e.html
- Secretariat of the Antarctic Treaty. (n.d.). *The Antarctic Treaty*. Retrieved August 3, 2020, from <https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html>

- Swain, A. (2021). *China's economy and military can overtake US, but it still won't become global superpower - China has the money, the weapons and the might. But it can't overthrow US from world hierarchy yet*. Retrieved February 16, 2021, from <https://theprint.in/opinion/chinas-can-overtake-us-but-it-still-wont-become-global-superpower/588718/>
- The Antarctic Treaty. (1961). *The Antarctic Treaty*. Washington, D.C.
- The Cove. (2022, June 6). *KYR: Antarctica - Military*. Retrieved from The Cove: <https://cove.army.gov.au/article/kyr-antarctica-military>
- Triggs, G. D. (1987). The Antarctic scene: legal and political facts. In G. D. Triggs (Ed.), *The Antarctic Treaty Regime Law, Environment and Resources* (p. 52). Melbourne: Cambridge University Press. Retrieved from Triggs, Gillian D.
- Trolle-Andersen, R. (1987). The Antarctic scene: legal and political facts. In G. D. Triggs (Ed.), *The Antarctic Treaty Regime Law, Environment and Resources* (pp. 51-64). Melbourne: Cambridge University Press.
- Walt, S. M. (1999). Rigor or Rigor Mortis? *Rational Choice and Security Studies*, 6-30.
- Watt, L.-M. v. (2019). Antarctica. *Antarctica*, I(1), 26.
- Weather Online. (2019). *Weather Online*. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Antarctica.htm>
- WION. (2021). *China pledges to build 'Polar Silk Road' by 2025 to tap natural resources*. Retrieved September 30, 2021, from <https://www.wionews.com/world/china-pledges-to-build-polar-silk-road-by-2025-to-tap-natural-resources-368390>
- Witteck, R. (2013). Rational Choive Theory. *Rational Choive Theory*.